



St. Vinsensius a Paulo sebagai “Politikus Handal” di Perancis: Tinjauan Teologi Kontekstual Bagi Politik Indonesia

Emmanuel Reynaldo Gunawan Utama

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
emmanuelgunawan14@gmail.com

Gabriel Geri Goa Adiman

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

Alosius Alan M

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

Abstract:

Politics in 17th century France dan Indonesia are similar in terms of political crises dan people's suffering. France, led by Prime Minister Mazarin, made a policy of raising taxes to finance overseas expansion. Meanwhile in Indonesia, the Dutch government controlled the politics of the Mataram Kingdom so that local policies were determined by the Dutch government. As a result, the people suffered from the pressure exerted in the social dan economic fields. Both concluded that the politicians of a country or kingdom are very influential for the justice dan welfare of the people. Political figures must be able to observe the reality of society so that the results of their observations are conveyed to the leaders of the state or kingdom to determine policies that are in accordance with the needs of the people. The expected communication from politicians or board members is communication that is solutive dan beneficial for the good of the people. So the author uses qualitative-descriptive methods from primary dan secondary sources. Primary sources come from the history of Vincent especially in the 17th century. Secondary sources come from Church documents related to socio-political issues.

Keywords: Politician, Justice, Welfare, People, Vincent

Abstrak

Perpolitikan pada abad ke-17 di Perancis dan di Indonesia memiliki persamaan dalam hal krisis politik dan penderitaan rakyat. Perancis yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mazarin membuat kebijakan kenaikan pajak untuk membiayai ekspansi ke luar negeri. Sedangkan di Indonesia, pemerintah Beldana menguasai perpolitikan Kerajaan Mataram sehingga kebijakan-kebijakan setempat ditentukan oleh pemerintah Beldana. Akibatnya adalah rakyat mengalami penderitaan karena tekanan yang diberikan di bidang sosial dan ekonomi. Keduanya itu menyimpulkan bahwa tokoh politikus suatu negara atau kerajaan sangat berpengaruh bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tokoh politikus harus mampu mengamati realitas masyarakat sehingga pengamatannya itu disampaikan kepada pemimpin negara atau kerajaan untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Komunikasi yang diharapkan dari tokoh politikus atau anggota dewan adalah komunikasi yang solutif dan menguntungkan kebaikan rakyat. Maka penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif dari sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer itu berasal dari sejarah Vinsensius khususnya pada abad ke-17. Sumber sekunder berasal dari dokumen-dokumen Gereja yang berkaitan dengan permasalahan sosial-politik.

Kata Kunci: Politikus, Keadilan, Kesejahteraan, Rakyat, Vinsensius



Introduksi

Pada abad 17, Prancis mengalami krisis secara politisi dan agama. Di sisi lain abad ini juga menampilkan masa hegemoni Prancis dengan ekspansi ke berbagai negara. Kardinal Richelieu sebagai Perdana Menteri Prancis di bawah kekuasaan Raja Louis XIII, yang berkuasa dari 1610 hingga 1643. Sekitar tahun 1635, Raja Louis XIII melibatkan Prancis ke dalam perang Tiga Puluh Tahun dengan Spanyol. Selama perang yang berlangsung seperempat abad telah membawa Prancis sebagai kekuatan yang mendominasi Eropa dan perang itu memerlukan biaya yang besar.¹

Setelah kematian Raja Louis XIII, kepemimpinan Kerajaan Prancis dipercayakan kepada istrinya yaitu Ratu Anne dari Austria.² Dalam menjalankan tugas sebagai ratu Prancis yang memegang kendali politik, Ratu Anna dibantu oleh Kardinal Mazarin. Mazarin ternyata memiliki ambisi yang besar sebagai Perdana Menteri yang baru. Ia menghendaki kebesaran Kerajaan Prancis di mata dunia sehingga ia melancarkan serangan kepada kekaisaran Habsbourg. Serangan tersebut memakan biaya yang besar sehingga ia membuat kebijakan untuk menaikkan pajak. Kenaikan pajak itu membuat rakyat menderita sehingga rakyat dan parlemen sepakat untuk berkoalisi dengan tujuan untuk melawan Mazarin secara politik. Kekacauan politik dimulai dan inilah permulaan terjadi perang “La Fronde”. Sebab relasi para elit politik dan raja menjadikan rakyat kebingungan dan menderita yang berkepanjangan.

Sejalan dengan abad 17 yang terjadi di Prancis, Indonesia juga mempunyai peristiwa yang fundamental dalam perpolitikan. Di abad ini, Indonesia disebut sebagai nusantara. Peristiwa yang terjadi adalah pemerintah Belanda memberikan hak monopoli perdagangan di wilayah ekspansinya sekitar tahun 1602.³ Monopoli perdagangan itu diatur oleh lembaga dagang yang disebut VOC (Verenigde Oostindische Compagnie). VOC mempunyai rencana untuk menguasai nusantara melalui perdagangan. Hal ini menimbulkan konflik dengan kerajaan-kerajaan Islam yang telah berdiri di nusantara sejak abad ke-13 yaitu Kerajaan Samudera Pasai.

Awal mula kedatangan VOC di nusantara itu berfokus perdagangan. Seiring berjalannya waktu, fokus VOC mulai meluas hingga masuk ke dalam perpolitikan pemerintahan kerajaan Mataram di Jawa Tengah.⁴ Penguasaan politik nusantara oleh VOC semakin kuat hingga membagi empat bagian kerajaan Mataram yang harus taat kepada kebijakan VOC. Perpolitikan kerajaan Mataram yang dicampuri oleh VOC dinilai sebagai permulaan penjajahan Belanda di Indonesia.⁵ Alasan itulah yang menyebabkan adanya pemberontakan dalam skala besar atas tekanan yang diberikan Belanda melalui VOC. Pemberontakan itu menggerakkan juga para tokoh agama dan seluruh rakyat

¹ Darrly Dee, “France in the 17th Century,” dipublikasikan pada tanggal 30 November 2015, https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780195399301/obo-9780195399301-0300.xml?utm_source, diakses pada hari Senin, 9 Juni 2025, pukul 09.00 WIB.

² Rafael Ishrianto, *Perwujudan Kasih Afektif Dan Efektif*, 1st ed. (Malang: Widya Sasana Publication, 2014).

³ Yudi Armansyah, “Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara : Yudi Armansyah Atas Pembasisan Kekuatan Politik , Selain Itu Berdirinya Kerajaan Tersebut Kehadiran Para Penjajah Dari Barat . Dimulai Dengan Munculnya Portugis , Pada Masa Kemerdekaan (Tepatnya Masa Ord,” *FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2017): 27–46.

⁴ <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-prakolonial/item123?>, diterbitkan pada 6 Juni 2025, diakses pada hari Senin, 9 Juni 2025, pukul 17.30 WIB.

⁵ Sukmurdianto dan Yulia, Zulfa Mona, “Kebijakan Pendidikan Islam Di Nusantara sebelum kemerdekaan: Kasus Kebijakan Politik Kolonial Belanda dan Jepang terhadap Pendidikan Islam di Indonesia,” *Mau'izhah* 10, no. 2 (2020): 143–64.

Indonesia karena kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di dalam jalur perdagangan telah membuat rakyat Indonesia menderita. Penderitaan inilah yang dilihat oleh para tokoh agama, yaitu para ulama Islam dan elit politik yang memutuskan untuk bersatu dengan rakyat dalam pemberontakan.

Garis besar dalam kesamaan antara situasi politik abad ke-17 di Perancis dan situasi politik abad ke-17 di Nusantara (sekarang Indonesia) adalah keprihatinan tokoh agama terhadap penderitaan rakyat sehingga keberanian bersatu bersama rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa. Dalam konteks mewujudkan kehidupan yang sejahtera, para elit politik yang berpihak kepada rakyat juga turut serta berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Kesamaan yang kedua adalah bahwa para tokoh agama mampu mengintegrasikan keimanannya ke dalam realitas masyarakat. Melalui sejarah ringkas tersebut, iman yang diajarkan oleh tokoh agama berwujud konkret yaitu perjuangan untuk hidup rakyat yang sejahtera dan adil. Sebab teologi dalam keagamaan itu selalu menjunjung kontekstualisasi agar umat beriman tidak berpandangan secara bertolak belakang dengan fenomena yang terjadi di masyarakat.

Tujuan dari tulisan ini adalah bahwa penulis hendak menyajikan realitas kepemimpinan tokoh agama dan para elit politik dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sebagai tekanan yang utama, penulis menyoroti kepemimpinan wakil rakyat yang berada di parlemen, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) terhadap pengawasan kebijakan pemerintah dan keputusan undang-undang. Sebagaimana Santo Vinsensius yang diangkat oleh penulis sebagai teladan para tokoh elit politik dan juga tokoh agama untuk berani menyuarkan keadilan yang diharapkan oleh rakyat. Vinsensius dengan latar belakang keimanannya tidak menjadi takut dan ragu untuk berpihak kepada penderitaan rakyat sehingga ia mampu mempengaruhi pemimpin negara atau kerajaan Perancis untuk meredam konflik di masyarakat karena kebijakan politiknya. Selain sebagai imam Gereja Katolik, Vinsensius ternyata mendapat kehormatan untuk menjadi anggota dewan hati nurani kerajaan. Hal ini bisa dilihat sebagai tindakan politis yang dilakukannya supaya politik dan moralitas tidak bersinggungan. Untuk itu, penulis merumuskan permasalahan tulisan ini ke dalam tiga pertanyaan yaitu apa peran St. Vinsensius a Paulo dalam urusan sosial-politik di Perancis setelah kematian Raja Louis XIII?, Apa refleksi teologis kontekstual dari tindakan-tindakan St. Vinsensius a Paulo? Dan bagaimana relevansinya dalam konteks Solitik di Indonesia?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penulis mendekati persoalan yang diangkat dalam tulisan ini dari sumber-sumber primer yaitu tulisan yang mencantumkan sejarah St. Vinsensius a Paulo. Sumber sekunder yang diteliti oleh penulis adalah tulisan-tulisan dari para anggota Kongregasi Misi sebagai pewaris spiritualitas Vinsensius. Untuk mengkombinasikan tulisan tersebut agar menemukan sisi teologi kontekstual, penulis juga memberikan pandangan dari dokumen Gereja Katolik, seperti *Evangelii Gaudium* dan *Gaudium et Spes*, serta ajaran sosial Gereja yaitu *Rerum Novarum*. Maka penulis menganalisis sumber-sumber tersebut dengan keterkaitannya dalam kesejarahan di Perancis dan Indonesia

Hasil dan Pembahasan

St. Vinsensius sebagai Politikus Handal

Pada abad ke-17 perancis mengalami ketidakstabilan ekonomi dan ketegangan sosial sehingga mengalami masa-masa sulit, termasuk dalam perang tiga puluh tahun yang mengakibatkan berbagai masalah ekonomi dan kesenjangan sosial. Setelah kematian Raja Louis XII pada tahun 1643 pemerintahan dipegang oleh Ratu Anne dari Austria sebagai wakil untuk putranya Louis XIV yang masih kecil ketika itu. Ratu Anne dari Austria menunjuk Kardinal Jules Mazarin sebagai penerus Kardinal Richelieu dan menjadi *de facto* pemimpin Prancis.⁶ Namun terdapat kebijakannya otoriter dalam ambisinya untuk meluaskan kekuasaan Prancis. Kardinal Jules Mazarin juga menarik pajak yang tinggi sehingga memperburuk situasi negara, terutama orang-orang miskin yang pada saat itu sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam pemerintahan yang dipenuhi krisis tersebut St. Vinsensius hadir sebagai pihak netral dan menjadi suara bagi rakyat dalam pemerintahan yang termasuk masa pemerintahan Mazarin. Meskipun lebih dikenal sebagai tokoh religius yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani kaum miskin melalui Serikat Kongregasi Misi dan Putri Kasih, ia juga memiliki berpengaruh dalam politik di pemerintahan Prancis. Walaupun tidak terlibat langsung dalam politik praktis tapi perannya sebagai penasihat moral dan mediator konflik memberikan dampak besar dalam situasi pemerintahan yang penuh masalah.

St. Vinsensius juga berperan dalam anggota Dewan Hati Nurani, sebuah badan penasihat spiritual dan moral yang termasuk masa pemerintahan Kardinal Mazarin untuk menangani urusan gereja dan negara. St. Vinsensius salah satu anggota penting, ia membawa pengaruh besar melalui pendekatannya yang penuh integritas dan kepedulian terhadap keadilan sosial. St. Vinsensius fokus menekankan reformasi gereja dengan pentingnya penunjukan uskup dan pemimpin gereja yang berkualitas, bukan hanya untuk mencari keuntungan politik atau pribadi.⁷ Meskipun menghadapi tekanan dari Kardinal Mazarin yang terkadang mengutamakan kepentingan politik dalam pengangkatan pejabat gereja St. Vinsensius tetap bersikeras agar moralitas dan kualitas menjadi kriteria umum. Meskipun kekuasaan Mazarin seringkali membatasi efektivitas dewan, peran St. Vincent de Paul di Dewan Hati Nurani membuktikan bahwa suara moral dapat memberikan pengaruh dalam pemerintahan yang didominasi intrik politik. Komitmennya terhadap reformasi gereja dan advokasi bagi kaum lemah meninggalkan warisan abadi, menunjukkan bahwa politik dan iman dapat bersinergi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Selain itu St. Vinsensius bukan politikus dalam arti partai, tapi negosiator yang cerdas dan bijaksana. Dalam konteks pemerintahan Perancis yang mengalami berbagai kesulitan St. Vinsensius berhasil mendirikan organisasi-organisasi sosial yang memberikan pelayanan kepada orang miskin.⁸ Walaupun terlibat dalam berbagai perundingan dan keputusan penting yang melibatkan tokoh-tokoh besar St. Vinsensius tidak pernah menggunakan metode politik yang bermusuhan. Ia lebih memilih menyeimbangkan berbagai kepentingan bersama tanpa mengorbankan prinsip moralnya. Kecerdasan sebagai negosiator terletak pada kemampuan untuk mendengarkan dan memahami pihak lain. St. Vinsensius mengajarkan untuk menciptakan perdamaian, seseorang harus mampu mengesampingkan ego pribadi dan bekerja untuk kesejahteraan orang banyak. Dalam berbagai negosiasi baik dalam urusan amal atau Gereja, seringkali

⁶ Rafael Ishrianto, *Perwujudan Kasih Afektif Dan Efektif*.

⁷ John E. Rybolt, "Vincent De Paul Dan The Reform Of The Clergy," *Bepress* 10, No. 2 (2010).

⁸ Dominique Iyolo, "Becoming A Poor Church For The Poor : The Vincentian Charism , An Invitation To The Church ' S Bold Reform Today" 38, No. 1 (2024).

menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan dalam menanggapi pihak-pihak yang berbeda pendapat serta berusaha menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan.

Menghadapi Ratu Anna dengan Keberanian Spiritual.

Sebagai seorang rohaniawan yang memiliki pengaruh besar St. Vinsensius tidak takut mengungkapkan prinsipnya dan keyakinannya yang telah ia temukan untuk kesejahteraan banyak orang meskipun menghadapi tantangan besar. Dimana keberanian St. Vinsensius dalam berhadapan dengan tokoh-tokoh besar seperti Ratu Anna. Dalam pertemuan dengan Ratu Anna St. Vinsensius tidak hanya bertindak sebagai penasihat spiritual tetapi juga berani menyampaikan pesan moral bagi pemerintahan yang dipegang Ratu Anna, bahkan ketika pesan yang disampaikan tidak selalu berjalan dengan kepentingan politik atau pribadi ratu saja. St. Vinsensius tidak ragu untuk mengingatkan Ratu Anna akan pentingnya kebijakan yang berpihak pada orang kecil dan mereka yang terpinggirkan serta mempertimbangkan aspek moral dalam pengambilan keputusan, terutama dalam Misi St. Vinsensius “untuk menginjili orang miskin”.⁹

Keberanian spiritual yang dimiliki Vinsensius dalam menghadapi figur-figur berkuasa seperti Ratu Anna menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang pendeta yang mementingkan urusan spiritual semata. Vinsensius memiliki pemahaman mendalam bahwa kekuasaan duniawi harus diarahkan untuk melayani kebaikan bersama dan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang bisa mengarahkan kekuatan dan pengaruhnya untuk tujuan yang lebih besar yaitu kasih sayang kepada sesama.

Kritik terhadap Mazarin secara Halus dan Etis.

St. Vinsensius memiliki kepemimpinan yang menarik dalam memberikan kritik. Kepemimpinan merupakan pengarahan dan pengordinasian yang baik terhadap berbagai tindakan.¹⁰ Sebagai tokoh penting dalam Gereja Katolik, St. Vinsensius memiliki kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan berbagai pemimpin politik termasuk Kardinal Mazarin yang pada saat itu memegang peran penting dalam pemerintahan Prancis. Kardinal Mazarin terkenal dengan kepemimpinan yang keras dan seringkali bertindak dengan cara yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi khususnya ambisi meluaskan kekuasaan Prancis. Namun meskipun Vinsensius tidak setuju dengan banyak kebijakan Kardinal Mazarin, ia tidak bisa menggunakan bersuara secara terbuka dalam mengungkapkan ketidaksetujuannya. Sebaliknya St. Vinsensius memilih untuk menyampaikan kritik secara halus namun tegas

Ia selalu berusaha menjaga etika dan moralitas dalam cara menyampaikan pendapat. Dengan pendekatan yang penuh kasih dan pengertian, St. Vinsensius mampu menunjukkan kepada Kardinal Mazarin dan tokoh-tokoh lainnya bahwa kebijakan yang mengutamakan kekuasaan dan kepentingan pribadi akan membawa dampak buruk bagi orang banyak. Melalui cara-cara yang lembut namun penuh makna St. Vinsensius menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya mengandalkan otoritas atau kekuasaan politik untuk mempengaruhi orang lain. Sebaliknya, ia mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, serta berusaha mendidik para pemimpin untuk bertindak dengan hati nurani yang bersih dan penuh kasih.

Diplomasi Berbasis Belas Kasih, bukan Kekuasaan

⁹ Daniel Franklin E Pilario, “ ‘ Go , Rebuild My House ’ Empowering The Church Of The Poor Through The Eyes Of Saint Vincent De Paul” 38, No. 1 (2024).

¹⁰ FX. E. Armada Riyanto dan Robertus Wijanarko, *Formasio Model Dan Dimensi Praksisnya* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021).

St. Vinsensius tidak hanya dikenal sebagai seorang tokoh agama tetapi juga sebagai seorang diplomat yang berlandaskan belas kasih. Dalam tindakannya ia selalu menekankan kasih dan kepedulian terhadap orang lain harus menjadi dasar dari segala keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hubungan politik.¹¹ Diplomasi yang ia jalankan bukanlah diplomasi kekuasaan melainkan diplomasi yang memprioritaskan kesejahteraan orang banyak. St. Vinsensius berpendapat bahwa pemimpin sejati tidak hanya mengadakan kekuasaan atau otoritas tetapi juga mereka yang mampu menunjukkan belas kasih dalam segala tindakannya. Pendekatan diplomasi selalu berpihak bertujuan pada kemasuaian dengan memberikan perhatian pada kebutuhan orang miskin dan terpinggirkan.

St. Vinsensius melihat bahwa perbedaan pendapat atau perbedaan status sosial tidak boleh menghalangi niat baik untuk saling membantu dan bekerjasama. Beberapa kesempatan St. Vinsensius menunjukkan bahwa perbedaan politik, agama atau sosial tidak perlu menjadi halangan bagi terciptanya perdamaian. Diplomasi berbasis belas kasih ini juga menjadi model bagi banyak orang yang terlibat dalam kerja-kerja sosial dan kemasuaian yang berusaha mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan melalui cara-cara yang penuh belas kasih dan penuh pengertian.

Tinjauan Teologi Kontekstual

Situasi sosial yang berkecamuk akibat perang dan kekuasaan politik membuat rakyat mengalami berbagai penderitaan. Vinsensius hadir dengan segala usaha dan pemberian dirinya untuk memberikan bantuan. Ensiklik *Evangelii Gaudium* yang membahas Kabar Suka Cita Injil dan keberpihakan Gereja kepada kaum miskin merupakan sebuah panggilan yang jauh sebelumnya sudah dilaksanakan oleh Vinsensius. Gereja mengajak setiap umat beriman untuk menjadi pewarta kabar baik terutama kepada kaum miskin. Dalam menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, Gereja berusaha mengambil sikap solid dengan siapa saja yang membutuhkan.¹² Sikap solid juga nampak dalam diri Vinsensius bahwa ia pun menjadi korban dari kekacauan kekuasaan politik yang terjadi saat itu. Di samping bahwa Vinsensius sendiri mengalami bencana, namun ia bersikap gigih dan mengambil tindakan. Kepekaan terhadap jeritan kaum miskin hanya dapat tumbuh apabila manusia sungguh tergerak oleh penderitaan sesamanya. Ajaran Kitab Suci menekankan pentingnya sikap murah hati sebagai bagian integral dari kehidupan beriman dan praksis Gereja. Pernyataan Yesus dalam Injil Matius 5:7 “Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan,” menegaskan bahwa belas kasih bukan sekadar kebajikan personal, melainkan juga jalan menuju anugerah ilahi. Hal ini ditegaskan kembali oleh Rasul Yakobus yang menunjukkan bahwa belas kasih merupakan dasar penghakiman di hadapan Allah. Sebaliknya, ketiadaan belas kasih akan berujung pada penghakiman yang keras dan tanpa ampun. Inilah yang menjadi kilas balik dari keprihatinan Vinsensius terhadap permasalahan yang sedang terjadi.

Situasi sosial yang tidak kunjung membaik menjadi keprihatinan Vinsensius yang membuat segera mengambil tindakan. Ia hadir sebagai sosok *prophet* (nabi) yang menasehati pihak-pihak politisi yang diketuai oleh Mazarin untuk memperhatikan penderitaan rakyat. Selain itu, Vinsensius juga hadir sebagai sosok *servant leader* yang dijiwai oleh semangat kerendahan hati, pelayanan, dan keteladanan. Sikap *prophet dan servant leader* merupakan sikap yang memandang manusia sebagai pribadi yang

¹¹ Rafael Ishrianto, *Perwujudan Kasih Afektif Dan Efektif*.

¹² *Evangelii Gaudium* Art. 187.

memiliki martabat. Keluhuran martabat manusia menjadi acuan dasar dalam menghargai manusia. Lebih jelas dalam Ensiklik *Gaudium et Spes*¹³ bahwa manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jiwa dan raga, menyatukan unsur-unsur dunia jasmani dalam dirinya. Karena itu, ia menjadi wakil seluruh ciptaan untuk memuji Allah. Tubuh manusia tidak boleh dianggap remeh, sebab diciptakan Allah dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sikap dan tindakan Vinsensius mengarah pada keberpihakan pada mereka yang kurang diperhatikan. Dengan demikian ia sungguh hadir dalam dan hidup bersama orang-orang yang terpinggirkan.

Keprihatinan yang diutarakan Vinsensius kepada para petinggi jabatan politik kerajaan bukan hanya sekedar kata belaka namun juga sungguh ia laksanakan. Vinsensius hadir bersama orang-orang miskin yang oleh kekacauan situasi sosial membuat mereka semakin hari semakin larut dalam penderitaan. Gereja mengajarkan bahwa keadilan harus menjadi dasar hubungan antara majikan dan buruh. Buruh wajib bekerja dengan jujur, mematuhi kontrak, dan menjauhi kekerasan serta pengaruh buruk. Di sisi lain, majikan harus memperlakukan buruh secara manusiawi, menghormati martabat mereka, memberikan upah adil, serta menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rohani maupun keluarga buruh. Keadilan menuntut tanggung jawab bersama demi kesejahteraan dan harkat setiap pribadi.¹⁴ Berangkat dari refleksi ini Vinsensius mau hadir secara langsung dan tinggal bersama mereka yang mengalami penderitaan. Kehadiran sosok yang begitu peduli pada mereka yang terpinggirkan menjadi sebuah sukacita tersendiri bagi mereka yang mengalami penderitaan.

Kekacauan sosial yang sedang terjadi merupakan sebuah panggilan untuk solidier dengan mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Gereja terus berupaya memberikan diri dengan berbagai bentuk pelayanan. Vinsensius menggunakan daya kreatifnya untuk bergerak aktif dan berusaha keluar dari permasalahan pribadinya dan masuk ke dalam permasalahan yang dialami oleh sesamanya. Semangat “Gereja yang bergerak keluar” sebagaimana ditegaskan dalam *Evangelii Gaudium*¹⁵ tampak nyata dalam hidup dan pelayanan Santo Vinsensius. Ia tidak tinggal diam dalam kenyamanan, tetapi dengan penuh keberanian melangkah keluar untuk hadir di tengah-tengah penderitaan rakyat yang ditinggalkan oleh kekuasaan. Vinsensius meneladani panggilan Allah seperti yang dialami Abraham, Musa, dan Yeremia yang membuatnya meninggalkan zona nyamannya demiewartakan Injil melalui tindakan nyata. Ia tidak hanya menyampaikan seruan moral kepada para pemimpin, tetapi juga hadir secara fisik dan emosional bersama kaum miskin dan terpinggirkan. Seperti Yesus yang terus berpindah kota untuk memberitakan Injil, Vinsensius pun tak berhenti bergerak, digerakkan oleh Roh untuk menaburkan benih kasih dan harapan di tengah masyarakat yang porak-pordana. Pelayanannya menjadi wujud nyata sukacita Injil yang hidup dan berbuah di tengah dunia yang terluka.

Apa yang dilakukan oleh Vinsensius merupakan cerminan hubungan timbal balik antara Gereja dan dunia sebagaimana ditegaskan dalam *Gaudium et Spes*.¹⁶ Gereja, yang berakar pada kasih Allah, didirikan oleh Kristus dan dijiwai oleh Roh Kudus, memiliki misi eskatologis yang hadir secara nyata dalam sejarah umat manusia. Dalam konteks ini, Vinsensius menjadi representasi Gereja yang bergerak bersama dunia, menunjukkan solidaritas nyata dengan mereka yang menderita. Tindakan dan pelayanan Vinsensius

¹³ *Gaudium Et Spes* Art. 14.

¹⁴ *Rerum Novarum*. Art. 17.

¹⁵ *Evangelii Gaudium*. Art. 20-21

¹⁶ *Gaudium Et Spes*. Art. 40.

bersama dengan CM dan juga para Suster PK mencerminkan peran Gereja sebagai komunitas rohani dan sosial yang dipanggil untuk menjadi rasi pembauran masyarakat. Pewartaan Injil tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata yang mengangkat martabat manusia dan memperkuat kehidupan sosial. Dengan jelas Vinsensius menunjukkan bahwa Gereja tidak berdiri di luar dunia, melainkan berjalan bersama dunia, dan saling memperkaya dalam misi pewartaan dan kemanusiaan.

Relevansi bagi Politik Indonesia

Politik di Indonesia dalam era modernitas telah mengembangkan cara politik melalui dunia digital. Politik digital yang acap kali digunakan oleh para politikus ditujukan supaya generasi muda melak terhadap permasalahan politik sehingga mereka pun dapat terlibat untuk menyelesaikan permasalahan politik. Digitalisasi dalam dunia politik terjadi mendanakan adanya pergeseran media politik yang dipengaruhi oleh Revolusi Industri 4.0.¹⁷ Bagi Farid, politik yang dikomunikasikan lewat digital akan memberikan efektifitas dalam penyampaian pesan politik kepada rakyat secara menyeluruh. Ruang digital mempermudah para elit politik untuk menentukan kebijakan yang diambil agar tercapailah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti isi butir kelima dari Pancasila.

Penggunaan media digital dalam berpolitik ternyata sudah dikerjakan oleh beberapa tokoh politik, antara lain adalah Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan Capres 2024,¹⁸ dan Anies Baswedan dalam Pilkada 2017 untuk DKI Jakarta.¹⁹ Kedua penelitian sebelumnya menemukan kesamaan dalam konsep politik digital yaitu para tokoh elit politik itu sedang membangun citra politik positif dan *personal branding* kepada semua lapisan masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah efektivitas penyelesaian masalah yang terjadi masyarakat. Tetapi tantangan sekaligus hambatan yang ditemukan dalam politik digital adalah berita *hoaks* sehingga rakyat menjadi bingung terhadap kebijakan pemerintah yang sesungguhnya. Penyimpangan ini menjadi kewaspadaan yang harus diatasi dengan tetap melakukan peninjauan langsung dari para politikus terhadap permasalahan rakyat.

Tantangan lain yang ditemukan adalah para elit politik menjadi lebih bebas dalam menentukan kebijakan karena rakyat tidak dilibatkan secara langsung. Kehadiran secara virtual menjadikan pemimpin itu tidak menyeluruh dalam pengamatan, penilaian, dan penindakan. Karena itu, pemimpin juga bisa menggunakan kemampuannya di dunia digital untuk memanipulasi segala sistem pemerintahan dan keuangannya. Maka kasus yang dapat terjadi di dalam dunia digital adalah korupsi secara tersusun karena transparansi pun bisa dimanipulasi oleh teknologi.

Untuk mendapatkan tujuan dari politik digital, para elit politik harus memiliki kesadaran akan tugas dan kewajibannya sebagai politikus. Mereka diharapkan untuk mampu mempengaruhi pemimpin negara dalam menentukan kebijakan yang mensejahterakan seluruh lapisan rakyat, khususnya mereka yang miskin. Kesadaran dan kehendak untuk berpihak kepada rakyat adalah modal dasar dalam berpolitik supaya segala cara yang digunakan untuk berpolitik tidak menyalahi konsep kebaikan bersama (*bonum commune*). Itulah yang diartikan sebagai unsur rohani dalam kepemimpinan politik. Rohani yang dimaksudkan adalah pertimbangan hati nurani dalam mengarahkan kebijakan-kebijakan ke arah yang bijaksana bagi semua golongan masyarakat. Artinya

¹⁷ Farid Nofiard, "Komunikasi Politik Digital Di Indonesia," *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 10, no. 2 (2022): 31–40.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dolly Indra dan Umaimah Wahid, "Tinjauan Literatur: Digital Komunikasi Politik Anies Baswedan," *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2021): 228–239.

kemampuan seorang pemimpin itu harus menguntungkan orang lain. Hal ini bertolak dari pemikiran etika politik Franz Magnis Suseno yang mengatakan bahwa pemimpin Indonesia juga dipengaruhi oleh etika politik Jawa.²⁰

Para politikus dalam perbdaningannya dengan sejarah Vinsensius, harus menyadari dirinya sebagai “nabi” yang memperjuangkan kehidupan semua orang, terlebih bagi orang-orang yang dipimpinnya. Unsur kenabian yang terdapat dalam diri politikus merupakan tugas yang harus dilaksanakan supaya kekacauan masyarakat tidak terjadi. Keadilan dan kesejahteraan merupakan nilai-nilai yang harus melekat di dalam setiap pemikiran para politikus agar kebijakan-kebijakannya itu membangun masyarakat yang maju.²¹ Para politikus juga diminta untuk menjadi penasihat dan pengingat bagi pemimpin negara sehingga pemimpin negara memiliki kesadaran untuk tetap berkomunikasi dengan para politikus dalam membuat kebijakan bagi negara. Hal ini dilakukan oleh Vinsensius ketika dirinya menjadi anggota dewan Hati Nurani kerajaan Perancis. Sisi inilah yang bisa disejajarkan dengan peranan anggota dewan perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan negara. Tugas mereka itu adalah menjadi “jembatan” antara rakyat dan pemimpin negara.

Seperti penjelasan di atas, tindakan-tindakan politis Vinsensius yang mempengaruhi pemimpin kerajaan Perancis dan Perdana Menterinya adalah teladan yang dapat diterapkan oleh para politikus dewasa ini. Vinsensius mengembangkan komunikasi politik yang humanis dan tidak menyudutkan pihak pemimpin negara serta keberpihakannya terhadap penderitaan rakyat memampukan dirinya untuk menyadarkan Ratu Anna dan Mazarin akan penderitaan rakyat. Selain teladan Vinsensius yang ditujukan kepada para politikus, para tokoh Gereja yaitu kalangan para klerus juga dipanggil untuk tetap berani menyuarakan keadilan rakyat dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum Gereja Katolik. Gereja juga harus terlibat dalam dinamika politik suatu bangsa supaya dimensi kerohanian dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dirasakan. Dengan demikian Gereja menghayati tugas pewartaan nilai-nilai ilahi yaitu kebenaran dan keadilan. Jadi setiap orang kristiani juga dipanggil untuk membuka diri dalam keterlibatannya di dunia politik. Inilah harapan bagi suara Gereja dapat didengar dan dipertimbangkan dalam kebijakan politik suatu negara.

Kesimpulan

Setelah kematian Raja Louis XIII, St. Vinsensius a Paulo memainkan peran penting dalam dinamika sosial politik Prancis. Ia juga merupakan anggota penting dalam Dewan Hati Nurani yang menjabat sebagai penasihat rohani dan moral yang dipercaya oleh ratu Anna dan dipanggil untuk menangani masalah keagamaan dan moralitas negara. Dalam dewan, St. Vinsensius Menjadi suara moral yang tegas namun penuh kasih dalam memberikan nasihat rohani kepada kerajaan khususnya dalam hal penunjukan uskup dan pemimpin Gereja yang berintegritas, buka hanya didorong oleh ambisi politik semata. Di Tengah gejolak politik seperti pemberontakan La Fronde, ia tampil sebagai penengah yang menolak kekerasan dan memperjuangkan perdamaian melalui negosiasi diplomasi bahkan berani menegur Kardinal Mazarin atas kebijakan yang menindas orang miskin, walaupun tidak secara terbuka langsung mengatakannya.

Tindakan-tindakan St. Vinsensius a Paulo menunjukkan bahwa iman yang otentik menuntut keberpihakan nyata kepada kaum miskin dan menderita melalui sikap solider,

²⁰ Wahyu Trisno Aji, “Dasar-Dasar Etika Politik Franz Magnis Suseno,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosia* 3, no. 4 (2024): 174–192.

²¹ *Ibid.*

belas kasih, serta keterlibatan aktif dalam situasi sosial yang tidak adil. Dalam semangat Injil dan ajaran Gereja, khususnya melalui Ensiklik *Evangeli Gaudium* dan *Gaudium et Spes*, Vinsensius tampil sebagai figur prophet dan servant leader yang menghidupi ajaran Kristus dengan turun langsung melayani, menegur penguasa, dan merawat martabat manusia, terutama mereka yang terpinggirkan. Kepekaannya terhadap jeritan kaum miskin serta komitmennya untuk hidup bersama mereka menjadi wujud nyata dari belas kasih Kristiani yang bukan sekadar teori, tetapi praksis iman yang mengubah realitas.

Berdasarkan paparan di atas, penulis menemukan bahwa kepemimpinan seorang tokoh politikus itu hendaknya berangkat dari realitas masyarakat, bukan berdasarkan idealisme yang dimilikinya. Realitas masyarakat adalah dasar dari suatu kebijakan pemerintahan agar keadilan dan kesejahteraan itu terwujud. Sebagai tokoh politikus, kepemimpinan yang menjalin komunikasi dengan rakyat dan pemimpin negara atau Presiden juga harus diperhatikan dengan benar dan tepat. Komunikasi tersebut merupakan sarana untuk menjembatani antara pemimpin tertinggi suatu negara dan rakyat. Dalam hal ini, tokoh politikus bisa memposisikan dirinya sebagai pejuang perdamaian sehingga segala kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif tidak ditentang oleh pemerintah. Tokoh-tokoh politikus merupakan kunci dari keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini diteladankan oleh Vinsensius ketika dirinya menjabat sebagai anggota dewan Hati Nurani. Jadi pemerintahan suatu negara yang berangkat dari realitas rakyat akan menunjukkan bahwa dirinya itu dapat didanalkan karena pengharapan akan kelayakan hidup diperoleh semua lapisan masyarakat.

Referensi [minimal 15, dianjurkan dari lima-sepuluh tahun terakhir]

Dokumen

Evangeli Gaudium, 2014.

Gaudium Et Spes, 2021.

Rerum Novarum, 2022.

Buku

Rafael Ishrianto. *Perwujudan Kasih Afektif Dan Efektif*. 1st ed. Malang: Widya Sasana Publication, 2014.

Wijanarko, FX. E. Armada Riyanto dan Robertus. *Formasio Model Dan Dimensi Praksisnya*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Jurnal Ilmiah

Aji, Wahyu Trisno. “Dasar-Dasar Etika Politik Franz Magnis Suseno.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosia* 3, no. 4 (2024): 174–192.

Armansyah, Yudi. “Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara: Yudi Armansyah Atas Pembasisan Kekuatan Politik , Selain Itu Berdirinya Kerajaan Tersebut Kehadiran Para Penjajah Dari Barat . Dimulai Dengan Munculnya Portugis , Pada Masa Kemerdekaan (Tepatnya Masa Ord.” *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2017): 27–46.

Indra, Dolly, dan Umaimah Wahid. “Tinjauan Literatur: Digital Komunikasi Politik Anies Baswedan.” *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2021): 228–39. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i2.6198>.

Iyolo, Dominique. “Becoming a Poor Church for the Poor : The Vincentian Charism , an

- Invitation to the Church ' s Bold Reform Today" 38, no. 1 (2024).
- Nofiard, Farid. "Komunikasi Politik Digital Di Indonesia." *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 10, no. 2 (2022): 31–40.
- Pilaro, Daniel Franklin E. "“ Go , Rebuild My House ’ Empowering the Church of the Poor through the Eyes of Saint Vincent de Paul” 38, no. 1 (2024).
- Rybolt, John E. "Vincent de Paul dan the Reform of the Clergy." *Bepress* 10, no. 2 (2010).
- Sukmurdianto, dan Yulia, Zulfa Mona. "Kebijakan Pendidikan Islam Di Nusantara sebelum kemerdekaan: Kasus kebijakan politik kolonial Belanda Dan Jepang terhadap Pendidikan Islam di Indonesia." *Mau'izhah* 10, no. 2 (2020): 143–164.

Sumber Internet:

- Darrly Dee, "France in the 17th Century," dipublikasikan pada tanggal 30 November 2015, https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780195399301/obo-9780195399301-0300.xml?utm_source , diakses pada hari Senin, 9 Juni 2025, pukul 09.00 WIB.
- <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-prakolonial/item123?>, diterbitkan pada 6 Juni 2025, diakses pada hari Senin, 9 Juni 2025, pukul 17.30 WIB.